Vol. 3 No. 2 (2025) | e-ISSN: 3031-0946
Maximal Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya dan Pendidikan
https://malaqbipublisher.com/index.php/MAKSI

Pendidikan Islam di Indonesia dan Prancis: Perbandingan kebijakan dan Perkembangan Pendidikan Islam

Miftahul Hasanah[1], Nabila Noor Adha[2], Jum'atul Hasanah[3], Aprizal Ahmad[4]
[1,2,3,4]Universitas Islam Negri Imam Bonjol Padang, Indonesia
Email: miftahulhasanah771@gmail.com[1], nabilanooradha19@gmail.com[2], jumatulhasanah677@gmail.com[3], apriz94722@gmail.com[4]

Abstrak

Pendidikan Islam di setiap negara berkembang dalam konteks sosial, politik, budaya, dan sejarah yang berbeda, sehingga menghasilkan karakter dan pola yang tidak selalu sama. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam perkembangan pendidikan Islam di Indonesia dan Prancis, serta menganalisis perbedaan kebijakan, kurikulum, dan dinamika kelembagaan yang memengaruhi arah perkembangan pendidikan Islam di kedua negara tersebut. Dukungan regulasi, seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Pesantren, memperkuat posisi pendidikan Islam sebagai bagian dari identitas bangsa dan instrumen pembentukan karakter generasi muda. Sebaliknya, Prancis memiliki sejarah yang sangat berbeda karena menganut prinsip laïcité atau sekularisme ketat yang membatasi munculnya praktik keagamaan dalam ruang publik, terutama institusi pendidikan negeri. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Pemisahan Gereja dan Negara tahun 1905, pendidikan agama tidak dimasukkan dalam kurikulum sekolah negeri dan simbol keagamaan dilarang, termasuk jilbab bagi siswa Muslim. Akibatnya, pendidikan Islam berkembang melalui lembaga swasta Muslim, masjid, serta pusat pembelajaran non-formal. Beberapa sekolah swasta seperti Ibn Rushd, Al-Kindi, Education et Savior, dan Reussite menjadi bukti upaya komunitas Muslim dalam mempertahankan pendidikan agama di tengah regulasi yang ketat. Namun, sekolah-sekolah ini tetap harus mengikuti kurikulum nasional Prancis yang bersifat sekuler dan menghadapi tantangan administratif serta stigma sosial terkait keberadaan pendidikan berbasis agama. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menganalisis berbagai sumber seperti makalah, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen kebijakan pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan utama antara Indonesia dan Prancis terletak pada bagaimana negara memosisikan agama dalam sistem pendidikan. Indonesia memberikan legitimasi dan dukungan struktural terhadap pendidikan Islam sehingga memungkinkan terciptanya lembaga yang kuat, inklusif, dan berkembang secara berkelanjutan. Di sisi lain, Prancis memperlakukan pendidikan Islam sebagai bagian dari ekspresi kebebasan individu yang tidak boleh mencampuri sistem pendidikan publik yang sepenuhnya sekuler. Perbandingan ini menunjukkan bahwa faktor historis, budaya, dan politik sangat memengaruhi model pendidikan Islam di suatu negara. Penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran komparatif mengenai perkembangan pendidikan Islam di dua negara dengan karakteristik sosial yang berbeda, tetapi juga menyoroti bagaimana kebijakan negara berperan dalam memperkuat atau membatasi ruang gerak pendidikan Islam. Temuan ini penting sebagai landasan bagi pengembangan studi perbandingan pendidikan Islam serta bagi para pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi pendidikan yang lebih inklusif, adaptif, dan responsif terhadap realitas masyarakat multikultural.

Kata Kunci: Pendidikan Islam; Indonesia; Prancis; Sekularisme; Laïcité.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi penting dalam membentuk kualitas suatu bangsa. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai proses transfer pengetahuan, melainkan juga sebagai sarana pembentukan karakter, nilai, dan identitas sebuah masyarakat (Akhyar et al., 2024). Dalam konteks masyarakat Muslim, pendidikan Islam memegang posisi sentral karena tidak hanya bertujuan membentuk kecerdasan intelektual, tetapi juga berperan besar dalam membangun moralitas, spiritualitas, serta perilaku sosial yang berlandaskan ajaran Islam. Maka dari itu, studi mengenai pendidikan Islam menjadi relevan, terutama ketika dihubungkan dengan dinamika sosial dan politik setiap negara yang memiliki orientasi dan kebijakan berbeda dalam memandang peran agama.

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki perjalanan panjang dalam perkembangan pendidikan Islam. Islam mulai masuk ke Nusantara sejak abad ke-13 melalui jalur perdagangan, dakwah, dan interaksi sosial budaya (Abdul Syukur Al-Azizi, 2025). Seiring waktu, pendidikan Islam tumbuh melalui lembaga-lembaga tradisional seperti surau dan pesantren. Pesantren bahkan menjadi institusi pendidikan tertua di Indonesia yang mampu bertahan dan berkembang hingga kini sebagai pusat penyebaran ilmu agama dan pembentukan karakter santri. Ketika Indonesia merdeka, pendidikan Islam mendapat legitimasi kuat melalui pembentukan Kementerian Agama serta masuknya mata pelajaran agama sebagai bagian wajib dalam kurikulum sekolah formal (Karimullah & Susanto, 2015).

Madrasah sebagai lembaga pendidikan formal berbasis Islam juga mendapatkan posisi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Pemerintah mengatur kurikulum madrasah agar mampu memadukan antara ilmu umum dan ilmu agama, sehingga lulusan madrasah memiliki kompetensi akademik sekaligus pemahaman keislaman yang kuat (Nurhidaya, 2025). Selain itu, lahirnya Undang-Undang Pesantren semakin memperkuat eksistensi pendidikan Islam sebagai komponen penting dalam pembangunan nasional. Dukungan pemerintah yang kuat ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam di Indonesia bukan hanya fenomena sosial-religius, tetapi merupakan bagian integral dari identitas bangsa yang menekankan keseimbangan antara ilmu, iman, dan akhlak.

Berbeda dengan Indonesia, Prancis memiliki konteks sejarah dan ideologi politik yang sangat berbeda. Prancis dikenal sebagai negara yang menerapkan sekularisme ketat atau laïcité, yaitu sebuah prinsip yang lahir dari sejarah panjang yang melibatkan konflik antara gereja dan negara sejak Revolusi Prancis (Syakhrani, 2022). Sekularisme ini diperkuat dengan diberlakukannya Undang-Undang Pemisahan Gereja dan Negara tahun 1905 yang menegaskan bahwa institusi publik, termasuk sekolah, harus bersifat netral dan bebas dari pengaruh agama. Konsekuensinya, sekolah negeri di Prancis tidak mengajarkan pendidikan agama dan melarang penggunaan simbol-simbol keagamaan seperti jilbab untuk siswa Muslim.

Walaupun demikian, perkembangan Islam di Prancis mengalami pertumbuhan signifikan seiring dengan meningkatnya populasi Muslim sebagai akibat dari imigrasi besar-besaran dari negara-negara Afrika Utara seperti Aljazair, Maroko, dan Tunisia pada abad ke-20 (Agung Sasongko, 2007). Penambahan populasi ini melahirkan kebutuhan akan pendidikan Islam bagi generasi Muslim. Namun, karena sekolah negeri tidak memberi ruang bagi pendidikan agama, komunitas Muslim kemudian mendirikan lembaga pendidikan swasta berbasis Islam. Beberapa sekolah seperti Ibn Rushd di Lille, Al-Kindi di Lyon, Education et Savior, dan Reussite berdiri sebagai upaya mempertahankan pendidikan agama di tengah regulasi sekuler (Akyuni, 2021). Meskipun sekolah-sekolah ini dapat beroperasi, mereka tetap harus mengikuti kurikulum nasional Prancis yang sepenuhnya sekuler, sehingga pelajaran Islam diajarkan sebagai mata pelajaran tambahan di luar kurikulum utama.

Perbandingan antara Indonesia dan Prancis menunjukkan adanya dua pendekatan berbeda dalam mengelola hubungan antara agama, negara, dan pendidikan. Indonesia

memberikan ruang luas dan dukungan kuat terhadap pendidikan Islam, sehingga lembaga seperti pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi Islam dapat berkembang secara berkelanjutan (Mustakim, 2021). Sebaliknya, Prancis menempatkan agama sebagai urusan privat dan membatasi kehadirannya dalam ruang publik, termasuk sekolah negeri. Hal ini menyebabkan pendidikan Islam hanya tumbuh melalui sekolah swasta dan lembaga non-formal di lingkungan komunitas Muslim.

Melihat perbedaan tersebut, penelitian mengenai perbandingan pendidikan Islam antara Indonesia dan Prancis menjadi penting. Tidak hanya untuk memahami faktor sejarah dan politik yang memengaruhi perkembangan pendidikan Islam di masing-masing negara, tetapi juga untuk melihat bagaimana masyarakat Muslim menyesuaikan diri dalam konteks yang berbeda. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pendidikan Islam, memperkaya perspektif komparatif, serta memberikan gambaran bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan pendidikan yang inklusif dan relevan dengan dinamika masyarakat multikultural.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik pendidikan Islam di Indonesia dan Prancis. Data utama penelitian diperoleh dari makalah yang menjadi objek kajian, khususnya pada bagian yang menjelaskan perkembangan pendidikan Islam di Prancis dan perbandingannya dengan Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan buku, jurnal ilmiah, artikel, serta laporan penelitian yang berfokus pada kebijakan pendidikan, sejarah pendidikan Islam, dan dinamika pendidikan di negara-negara sekuler. Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah melakukan analisis isi (content analysis) dengan mengidentifikasi tema-tema penting seperti perkembangan lembaga pendidikan Islam, kebijakan negara terhadap pendidikan agama, dan perbandingan kurikulum (Akhyar & Zukdi, 2025). Analisis dilakukan secara deskriptif dengan tujuan menjelaskan persamaan, perbedaan, serta konteks historis yang mempengaruhi perkembangan pendidikan Islam di kedua negara. Metode ini dipilih karena paling sesuai untuk menelaah fenomena pendidikan melalui data tertulis dan teori yang telah dikembangkan oleh para ahli sebelumnya**.**

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Sistem Pendidikan di Prancis

Dari sisi historis, Perancis merupakan unit politik yang dipersatukan oleh penjajahan Romawi Kuno, yang terdiri dari wilayah bangsa Gallia yang ditaklukan oleh kekuatan miliner Julius Caesar, sehingga sejak saat itulah Prancis memiliki keterkaitan dengan Romaws melalui bahasa, agarna dan jaga politik. Pada abad 15 ketika Capet masih berkuasa dan memerintah Prancis, doktrin kekuasaan ketuhanan raja diperkooh (Akhyar et al., 2025). Dalam doktrin tersebut seseorang menjadi raja adalah titah dari Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat.

Prancis modern adalah Prancis yang dimulai dari pendirian republik ketiga. Kemajuan yang dicapai oleh penguasa republik ketiga dengan herbagai ide-ide pemikiran sosial, politik, ekonomi, termasuk pendidikan yang digagas oleh kaum menengah ini menjadikan bangsa Prancis berubah menjadi sosok bangsa yang maju dan disegani di kancah Eropa. Pada abad ke-18 sampai 19, Prancis membangun salah satu kekaisaran kolonial terbesar pada waktu itu, yang membentang Inas melintasi wilayah Afrika Barat dan Asia Tenggara, sekaligus mempengaraht budaya dan politik wilayah. Kemajuan kehidupan bidang sosial ekonomi dan politik berjalan seiring dengan pembangunan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat

Prancis. Pembangunan sistem pendidikan dilakukan secara pasif di Prancis dimulai sejak akhir abad ke-19.

Cara sentralistik Secara umum pendidikan di Prancis desa ini berlangsang Kementerian pendidikannya adalah Ministry of National Euhmation yang dipimpin oleh seorang menteri dengan dibantu oleh seorang depati, Sentralisasi penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah (Anggun, et al.,2023).

Kebijakan Pendidikan Islam di Prancis Islamophobia mendapatkan tempat di Prancis, sebagian besar upaya legislatif untuk membatasi ekspresi dan praktik Muslim belum berhasil, termasuk di kampus, tempat kerja, serta memblokir program halal dalam makan siang di sekolah. Selain itu, sekolah swasta dapat dibuka secara hukum, namun jumlahnya sangat terbatas, karena dikenakan biaya yang tinggi (Muhammad Nabel, tt). Terdapat tiga jenis sekolah di Prancis, yaitu: sekolah umum, Katolik (disubsidi negara), dan swasta. Di sekolah umum, tampilan simbol agama di fasilitas sekolah sangat dilarang, seperti: jilbab, kipa atau salib besar. Larangan ini sebagaimana undang-undang tahun 2004 menyatakan bahwa pakaian dan simbol agama memanifestasikan afiliasi keagamaan siswa di sekolah negeri tidak diperbolehkan(Suryadarma, 2022).Akhirnya, sebagian sekolah Muslim yang dikelola swasta berada di bawah kewenangan negara, berarti mereka menerima dana negara untuk gaji para guru, dengan konsekuensi mengikuti kurikulum nasional. Sekolah juga harus berfungsi selama lima tahun agar mendapatkan pendanaan negara. Sekolah Tinggi Averroes merupakan salah satu sekolah Muslim yang menarik banyak perhatian ketika menerima peringkat teratas di Prancis Meskipun PAI tidak diajarkan dalam sistem sekolah yang didanai publik Prancis, orang tua yang menginginkan anaknya belajar tentang Islam di luar rumah, mengirim anak-anaknya ke kelas siang atau akhir pekan yang disediakan oleh masjid dan organisasi Islam swasta. Meskipun pendidikan agama di Prancis bukan mata pelajaran sekolah yang terpisah, pendidikan tentang agama kini telah dimasukkan dalam mata pelajaran sejarah dan filsafat. Subjek ini, membahas kontribusi agama terhadap peradaban daripada ritual dan keyakinan agama saja. Misalnya, agama Islam dianggap sangat penting secara historis bagi perkembangan Mediterania, karena kemajuannya dalam bidang al-jabar (Yudikati,2022).

Sistem Perjenjangan Pendidikan di Perancis Gambaran umum Sistem Pendidikan di Perancis pada dasarnya ada 4 degree:

1. Maternelle (setara playgroup dan TK) mulai dari umur 2 th

   Sejak tahun 1967, semua anak di Perancis dikenakan wajib belajar sampai dengan umur 16 tahun. Seperti di negara-negara lain, sekolah di Perancis dimulai dari tingkat Taman Kanakkanak (TK)/Ecole Maternelle sebagai tingkat pra-sekolah. Seorang anak yang sudah berumur 2 tahun dengan ditambah syarat-syarat tertentu sudah boleh masuk TK, walaupun pada umumnya anak anak masuk TK berumur antara 3 sampai 4 tahun. Pendidikan pra sekolah dibagi menjadi 3 tingkat: kecil, sedang dan besar. Pada tahap ini anak- anak diperkenalkan cara hidup berkelompok, keterampilan sederhana dan pengenalan huruf- huruf serta angka. Sekolah TK ini terdiri dari bermacam-macam, di antaranya; Toute Petite Section (mulai umur 2), Petit Section (3 th), Moyen Section (4 th) TKA, Grand Section (5 th) TKB.(Syakhrani,2022).
2. Pendidikan Dasar

   Pendidikan dasar dimulai pada usia 6 tahun dan selama 5 tahun: Jenjang Persiapan (CPI), Dasar 1 (CE1), Dasar 2 (CE2), Menengah (CM1) dan Menengah 2 (CM2). Tujuan utama pendidikan dasar ini adalah untuk mengajarkan pada anak-anak kehidupan bermasyarakat memberikan kemampuan membaca dan berhitung dengan persiapan untuk melanjutkan ke pendidikan menengah (Iycees dan Colleges). Pendidikan ini berkewajiban menggabungkan kepentingan dasar pendidikan dan kesenangan, atau bermain suatu pendekatan yang terbukti berhasil pada anak-anak. Dewasa ini hampir 100% anak yang berumur 6 tahun sudah memasuki bangku sekolah

dasar. Anak-anak sekolah di TK dan SD negeri dibebaskan dari pembayaran, dan memperoleh buku-buku pelajaran secara gratis (Ahmad, 2024).

3. Pendidikan Menengah Pertama

   Pendidikan menengah tersedia secara tradisional disekolah negeri yang disebut lycee dan sekolah kotapraja yang disebut college. Menurut sejarahnya, lyce lebih selektif sehingga memilki reputasi sebagai yang lebih sempurna. College cenderung mengakomodasi cita rasa pendidikan modern dah lebih cepat berafaptasi dengan permintaan umum warga kotapraja yang mendukungnya. Meskipun demikian, kedua jenis sekolah tersebut mempersiapkan siswa untuk ujian baccalaureat sehingga mempersiapkan pula penerimaan ke universitas. Sekolah menengah bisa di masuki dari sekolah dasar, tetapi ada jalur lain yang lebih. disukai, yaitu lewat classes preparatoire (Fuad et al., 2023). Classes preparatoire adalah sekolah swasta yang seringkali memilki perkanjian kerja dengan satu lycee atau lebih untuk meyakinkan para orang tua yangmenjadi penyantunnya bahwa putra-putra mereka akan diterima disekolah menengah.

4. Pendidikan Tinggi

   Pendidikan tinggi diselenggarakan dalam beberapa bentuk. Hampir semua akasemi memilki fakultas universitas jenis konvensional, tetapi tidak semuanya mempunyai perangkat fakultas yang lengkap. Seirinng dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, sumbangsih universitas dalam bidang-bidang ini diperluas dengan meningkatkan daya tamping kelas pada fakultas-fakultas yang sudah ada taupun menambahkan fakultas-fakultas baru (I. N. Thut dan Don Adams). Sistem pendidikan di Perancis dari awal sudah dapat mendeteksi bakat dan kemampuan anak, dan sudah bisa menentukan jurusan sesuai minat anak sejak dini. Jadi tidak semua anak berlomba-lomba ingin menjadi insinyur atau jurusan teknik. Siswa juga tidak dituntut harus menguasai seluruh mata pelajaran, akan tetapi cukup hanya basicnya saja, baru bidang yang sesuai dengan bakat dan kemampuan siswa dipelajari secara lebih mendalam, sehingga lebihfokus. Apalagi yang berminat melanjutkan ke Grande Ecole, harus melewati test yg benar benar ketat untuk bisa masuk. Baru yang nggak masuk, larinya ke universitas biasa (syakhraini,2022).

Kebijakan Pendidikan di Indonesia

Kebijakan pendidikan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang RepublikIndonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diarahkan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan.
2. Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara professional.
3. Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai.
4. Melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen.

5. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
6. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan lindungan sesuai dengan potensinya.
7. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti.
8. Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi (Rozak & ziyadah,2021).

Indonesia Setelah Indonesia merdeka, umat Islam semakin menyadari pentingnya perjuangan Umat Islam dalam meraih kemerdekaan, dan pemerintah berusaha melakukan memperbaiki pendidikan Islam di Indonesia, dan Sebagai realisasinya Pemerintah Indonesia telah merumuskan dalam undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan Nasional yang diteruskan dengan UU No. 20 Tahun 2003 yang mengatur penyelenggaraan satu sistem Pendidikan nasional, sebagai upaya pengintegrasian pendidikan Islam dalam sistem pendidikan Nasional, maka dalam makalah ini akan membahas tentang Pendidikan Agama Islam dalam sistem pendidikan Nasional.Pendidikan Islam (pelajaran agama) telah diajarkan di sekolahsekolah negeri sejak Indonesia merdeka tahun 1945. Pada masa kabinet RI pertama tahun 1945, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang pertama Ki Hajar Dewantara telah mengirimkan surat edaran ke daerah-daerah yang isinya menyatakan bahwa pelajaran budi pekerti yang telah ada pada masa penjajahan Jepang tetap diperkenankan dan diganti namanya menjadi pelajaran Agama. Pada saat tersebut, pendidikan agama belum wajib diberikan pada sekolah-sekolah umum, namun bersifat sukarela/fakultatif, dan tidak menjadi penentu kenaikan/kelulusan peserta didik

Perkembangan Pendidikan Islam di Prancis

1. Sejarah Perkembangan Pendidikan di Prancis

   Perkembangan Islam di Prancis mulai menunjukkan kemajuan yang berarti semenjak akhir abad ke-19. Bahkan pada tahun 1922, telah berdiri sebuah masjid yang sangat megah bernama Masjid Raya Yusuf di ibu kota Prancis, Paris. Hingga kini, tercatat lebih dari 1.000 masjid berdiri di seantero Prancis. Masjid Agung Paris (masyarakat setempat menyebutnya Grande Mosque de Paris) merupakan salah satu masjid megah yang berdiri di ibu kota Prancis, Paris. Masjid ini terletak di pertigaan Rue Dauberton dan Rue Geffrey-Saint Hilaire Paris Ile de France, sekitar 7-10 Km dari menara Eiffel.

   Seiring berjalannya waktu, perkembangan Islam di Prancis semakin pesat, pada tahun 1985, diselenggarakan konferensi besar Islam yang dibiayai Rabithah Alam Islami (Organisasi Islam Dunia). Turut serta dalam konferensi itu 141 negara Islam dengan keputusan mendirikan Federasi Muslim Prancis. Perkembangan Islam di Prancis juga diiringi dengan bertambahnya jumlah sarana ibadah dan kegiatan keislaman. Menurut survei yang dilakukan kelompok muslim Prancis, sampai tahun 2003, jumlah masjid di seantero Prancis mencapai 1.554 buah. Mulai dari yang berupa ruangan sewaan di bawah tanah sampai gedung yang dimiliki oleh warga muslim dan dibangun di tempat-tempat umum (Febriani et al., n.d.).

   Tak hanya masjid yang berkembang pesat di Prancis, lembaga pendidikan Islam di negeri mode ini pun turut berkembang. Sejumlah sekolah Islam berdiri. Sampai kini, sedikitnya ada empat sekolah muslim swasta. Awalnya, sebuah sekolah didirikan di

Vitrerie, pinggiran selatan Paris. Kurikulumnya disesuaikan dengan kurikulum pendidikan nasional Prancis, namun ada tambahan pelajaran khusus muatan lokal tentang keislaman, seperti bahasa Arab dan agama Islam. Setelah berdiri lembaga pendidikan tersebut, kemudian berdiri sekolah kedua, yaitu Education et Savior, yang dibuka di Paris setelah sekolah Reussite di pinggiran Aubervilliers, utara Paris, dan yang keempat di Prancis. Dua sekolah swasta Islam lainnya adalah Ibn Rushd di kota Lille, utara Prancis, dan Al-Kindi di kota Lyon(Abdul Syukur Al-Azizi, 2025). Saat ini, perkembangan Islam di Prancis memang sangat menggembirakan. Menurut catatan yang dikeluarkan oleh Badan Statistik resmi di Prancis, dalam satu tahun, mereka mencatat ada 4.000 ribu warga Prancis yang beralih masuk Islam. Data ini sesuai dengan yang ditampilkan oleh penelitian Kementerian Dalam Negeri Prancis.

Pendidikan Islam di Prancis mulai berkembang signifikan pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, seiring dengan imigrasi massal Muslim dari negara-negara seperti Aljazair, Maroko, Tunisia, dan wilayah Maghribi lainnya, terutama pada 1960-an melalui program migrasi buruh. Pada 1922, berdirinya Masjid Raya Yusuf (Grande Mosquée de Paris) menjadi tonggak awal, yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah tetapi juga pusat pendidikan Islam informal, termasuk pengajaran bahasa Arab dan studi agama. Hingga kini, dengan populasi Muslim lebih dari 5 juta jiwa (sekitar 8-10% dari total penduduk Prancis), pendidikan Islam telah berevolusi dari kelas-kelas masjid menjadi lembaga formal yang diakui negara, meskipun dibatasi oleh prinsip sekularisme (laïcité) yang ketat.

2. Lembaga Pendidikan Islam
   a. Education et Savior (Paris): Didirikan di pinggiran selatan Paris (Vitry-sur-Seine), sekolah ini adalah yang kedua di Paris setelah Reussite di Aubervilliers. Kurikulum mengikuti standar nasional Prancis dengan tambahan mata pelajaran Islam seperti bahasa Arab, fiqih, dan akidah. Sekolah ini mendapat izin operasional dari pemerintah tanpa hambatan signifikan.
   b. Reussite (Aubervilliers, utara Paris): Sekolah Islam swasta pertama di wilayah Paris, fokus pada pendidikan dasar hingga menengah dengan penekanan pada integrasi nilai Islam dalam pembelajaran sekuler.
   c. Ibn Rushd (Lille, utara Prancis): Salah satu sekolah Islam tertua, menawarkan pendidikan holistik yang mencakup sains, bahasa, dan studi Islam, dengan lebih dari 300 siswa.
   d. Al-Kindi (Lyon): Dibuka pada 2006, sekolah ini menghadapi penolakan awal dari otoritas lokal karena isu kebersihan dan keselamatan, tetapi dibuka kembali pada 2007 setelah putusan pengadilan. Kini menjadi model bagi sekolah Islam lain di selatan Prancis(Agung sasongko, 2007).
   e. Selain sekolah formal, terdapat ratusan pusat kursus di masjid (seperti lebih dari 1.000 masjid di seluruh Prancis) yang mengajarkan hafalan Al-Qur'an, tarbiyah anak, dan pendidikan dewasa, sering dikelola oleh organisasi seperti Union des Organisations Islamiques de France (UOIF).
3. Tantangan dalam Pengembangan Pendidikan Islam
   a. Larangan Simbol Keagamaan, pada tahun 2004 undang-undang yang melarang jilbab dan simbol agama di sekolah negeri memicu keluarnya siswi muslim, mendorong permintaan sekolah swasta Islam. Kasus ini dimulai sejak 1989 dengan demonstrasi pelajar Muslimah yang menuntut hak berhijab, dan baru pada 1992 pemerintah mengizinkan jilbab di sekolah negeri dengan syarat tidak mengganggu pembelajaran.

b. Proses Perizinan yang Ketat, banyak sekolah Islam menghadapi penolakan dari badan pendidikan regional (académie), seperti kasus Al-Kindi yang ditutup sementara. Namun, putusan pengadilan sering mendukung pembukaan, mendorong lebih banyak inisiatif Muslim.
c. Integrasi Kurikulum, sekolah Islam harus menyesuaikan 70-80% kurikulum dengan standar nasional Prancis (fokus pada bahasa Prancis, sejarah Eropa, dan sains sekuler), sementara 20-30% untuk konten Islam, yang menimbulkan tantangan dalam menjaga identitas agama di tengah sekularisme(Akyuni, 2021).
d. Kontroversi Sosial, insiden seperti penutupan sementara sekolah atau tuduhan radikalisasi membuat komunitas Muslim lebih vokal, dengan UOIF memimpin kampanye untuk hak pendidikan berbasis agama.

Perbandingan Pendidikan Islam di Indonesia dan Prancis

1. Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia dan prancis

Pendidikan Islam di Indonesia dimulai sejak abad ke-13, ketika Islam masuk melalui jalur perdagangan, dakwah, dan perkawinan. Pada masa itu, pendidikan Islam dilakukan secara sederhana di rumah-rumah ulama, surau, dan masjid. Sistem pengajaran berpusat pada Al-Qur'an, tajwid, doa-doa harian, serta ajaran dasar akidah dan akhlak. Bentuk ini masih bersifat non-formal dan lebih menekankan pada pembentukan keimanan serta pembiasaan ibadah. Seiring berkembangnya Islam, muncullah pesantren sebagai lembaga pendidikan khas Nusantara. Pesantren menjadi pusat belajar agama melalui kitab kuning yang membahas fiqih, tauhid, tafsir, hadis, dan tasawuf. Santri tinggal di asrama dengan bimbingan seorang kiai. Pesantren tidak hanya mendidik ilmu agama, tetapi juga menanamkan nilai moral, kemandirian, dan dakwah (Gusli et al., 2023). Hingga kini, pesantren masih bertahan sebagai warisan asli pendidikan Islam Indonesia (Alatas,2022).

Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, pendidikan Islam memperoleh pengakuan resmi. Negara membentuk Kementerian Agama untuk mengatur pendidikan agama dan madrasah. Pendidikan agama Islam juga diwajibkan di sekolah-sekolah umum. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam menjadi bagian integral dari sistem pendidikan nasional Indonesia (Karimullah, 2015). Berbeda dengan Indonesia, Prancis memiliki sejarah pendidikan yang sangat dipengaruhi oleh prinsip laïcité (sekularisme) sejak Revolusi Prancis (1789). Gereja yang sebelumnya berperan besar dalam pendidikan dipisahkan dari negara. Pada tahun 1905, disahkan Undang-Undang Pemisahan Gereja dan Negara, yang melarang negara mendukung atau mencampuri urusan agama dalam pendidikan.

Sejak saat itu, pendidikan negeri di Prancis sepenuhnya bebas dari unsur agama. Islam masuk ke Prancis terutama melalui imigrasi dari Afrika Utara (Aljazair, Maroko, Tunisia) sejak abad ke-20. Awalnya, pendidikan Islam hanya dijalankan secara informal di rumah dan masjid komunitas. Seiring bertambahnya jumlah muslim, muncul kebutuhan mendirikan lembaga pendidikan Islam formal, meskipun berhadapan dengan aturan sekularisme yang ketat. Pada abad ke-20 hingga sekarang, umat Islam di Prancis mulai mendirikan sekolah swasta Muslim. Namun, sekolah-sekolah ini harus mengikuti kurikulum nasional Prancis untuk mendapatkan pengakuan legal. Pendidikan Islam biasanya dilaksanakan di luar jam sekolah, seperti kursus sore atau akhir pekan di masjid (Lestari et al., 2023). Tantangan muncul karena pemerintah Prancis melarang simbol-simbol keagamaan di sekolah negeri, termasuk jilbab, yang menimbulkan kontroversi di kalangan Muslim.

Jika Indonesia memiliki sejarah panjang pendidikan Islam yang tumbuh bersama budaya lokal dan mendapat legitimasi negara setelah merdeka, maka Prancis justru berkembang dengan dasar sekularisme yang ketat sehingga agama tidak masuk

dalam sistem pendidikan publik. Pendidikan Islam di Indonesia tumbuh kuat karena mayoritas penduduknya beragama Islam, sementara di Prancis, pendidikan Islam berkembang terbatas karena Muslim merupakanminoritas dan kebijakan negara membatasi ekspresi agama dalam pendidikan (syakhrani, 2022).

2. Perbandingan kebijakan pemerintah dalam pendidikan Islam di Indonesia dan Prancis:

Aspek	Indonesia	Prancis
Dasar Kebijakan	DasarKebijakanPendidikan Islam diakui dalam sistem pendidikan nasional diatur oleh Kementerian Agama.	Pendidikan negeri berlandaskan laïcité sekularisme agama dipisahkan dari sekolah negeri sejak UU 1905.
Kurikulum	Madrasah menggabungkan ilmu agama dan umum. Pesantren fokus agama, tetapi ini juga ada pelajaran umum.	Sekolah negeri hanya memuat ilmu umum tanpa pelajaran agama. Sekolah Islam swasta boleh menambahkan agama, tapi harus ikut kurikulum nasional.
Lembaga Pendidikan	Ada madrasah (MI, MTs, MA), pesantren, dan Perguruan Tinggi Islam Negeri (UIN, IAIN, STAIN).	Pendidikan Islam hanya melalui sekolah swasta Muslim atau kursus non-formal di masjid/komunitas.
Pendidikan Agama di Sekolah Umum	Wajib: semua sekolah negeri dan swasta memberikan pelajaran agama sesuai agama siswa	Tidak ada: sekolah negeri tidak mengajarkan agama sama sekali.
Dukungan Pemerintah	Ada pendanaan, regulasi, dan pengakuan resmi (misalnya UU Pesantren 2019).	Sekolah swasta bisa dapat subsidi negara jika patuh pada kurikulum nasional, tetapi pendidikan agama tidak didanai penuh.
Simbol Keagamaan	Bebas memakai atribut keagamaan (jilbab, peci, dsb.) di sekolah	Dilarang di sekolah negeri (sejak 2004), termasuk jilbab, salib besar, atau kippa.
Dampak	Pendidikan Islam berkembang kuat, menjadi bagian dari identitas bangsa	Pendidikan Islam terbatas, berkembang di luar sekolah negeri, dan sering menghadapi tantangan kebijakan sekuler.

(Mustakim, 2021)

3. Perbandingan kurikulum Pendidikan islam di Indonesia dan prancis

Aspek	**Indonesia**	Prancis
Dasar Kurikulum	Menggunakan Kurikulum Nasional (K13, Merdeka Belajar) yang menginteragsikan ilmu agama dan umum.	Kurikulum nasional sepenuhnya sekuler (tanpa muatan agama).
Pendidikan Agama	Wajib di semua sekolah (SD–SMA), siswa belajar agama sesuai agamanya, termasuk PAI (Al-Qur'an, Hadis, Fiqh, Akidah Akhlak, SKI).	Tidak ada pelajaran agama di sekolah negeri. Pendidikan agama hanya tersedia di sekolah swasta atau lembaga non-formal (masjid/komunitas).
Madrasah dan Sekolah	Madrasah (MI, MTs, MA) memasukkan ilmu agama lebih banyak dibanding sekolah umum. Pesantren juga punya kurikulum khas berbasis kitab kuning.	Sekolah Muslim swasta dapat menambah pelajaran agama, tapi tetap harus mengikuti kurikulum nasional Prancis agar diakui.
Evaluasi atau Penelitian	Pendidikan agama masuk dalam rapor siswa bersama pelajaran umum.	Tidak ada penilaian resmi untuk agama di sekolah negeri. Jika ada, penilaian hanya di sekolah swasta atau kursus agama komunitas.
Arah Pengembangan	Kurikulum PAI kini diarahkan ke integrasi ilmu agama, sains, literasi digital, dan karakter.	Kurikulum Prancis fokus pada kompetensi akademik sekuler (matematika, sains, bahasa, filsafat, dsb.), agama di luar sekolah.
Dampak	Pendidikan Islam tumbuh kuat, terstruktur, dan menjadi bagian identitas bangsa.	Pendidikan Islam terbatas, lebih bergantung pada komunitas Muslim, dengan akses & kualitas yang bervariasi.

(Nurhidaya, 2025)

KESIMPULAN

Penelitian ini mengenai perbandingan pendidikan Islam di Indonesia dan Prancis menunjukkan bahwa perkembangan, karakteristik, serta arah pendidikan Islam di kedua negara sangat dipengaruhi oleh konteks sejarah, ideologi politik, budaya masyarakat, dan kebijakan negara. Melalui analisis mendalam, terlihat bahwa model pendidikan Islam di Indonesia berkembang dalam suasana yang mendukung dan inklusif, sementara di Prancis, pendidikan Islam berkembang dalam ruang yang terbatas dan bersifat privat akibat penerapan sekularisme ketat (laïcité).

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, menjadikan pendidikan Islam sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Negara memberi ruang yang luas melalui kebijakan formal seperti pengakuan madrasah, pembinaan pesantren, kewajiban pelajaran agama di sekolah umum, serta dukungan regulatif melalui berbagai undang-undang, termasuk UU Sisdiknas dan UU Pesantren. Pengakuan ini bukan sekadar formalitas administratif, tetapi juga menyiratkan pandangan bahwa pendidikan Islam adalah pilar penting pembentukan identitas bangsa, moralitas masyarakat, dan karakter generasi muda.

Akibatnya, lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti madrasah, pesantren, sekolah Islam terpadu, hingga perguruan tinggi Islam tidak hanya tumbuh secara kuantitatif tetapi juga berkembang secara kualitatif, mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum agar dapat menjawab tantangan perkembangan zaman.

Sebaliknya, Prancis memiliki pendekatan yang sangat berbeda sebagai akibat dari sejarah panjang konflik antara gereja dan negara yang melahirkan prinsip laïcité. Prinsip ini menempatkan agama dalam ranah privat dan melarangnya memasuki ruang publik, termasuk sekolah negeri. Kebijakan ini membuat pendidikan agama tidak memiliki tempat dalam kurikulum nasional sekolah publik. Oleh karena itu, pendidikan Islam di Prancis hanya dapat berkembang melalui sekolah swasta Islam, masjid, dan lembaga non-formal milik komunitas Muslim. Walaupun terdapat beberapa sekolah Islam seperti Ibn Rushd dan Al-Kindi, pertumbuhannya menghadapi kendala administratif, stigma politik, dan tuntutan untuk mengikuti kurikulum nasional yang sepenuhnya sekuler. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam di Prancis tidak hanya menghadapi tantangan struktural, tetapi juga tantangan sosial dalam bentuk persepsi publik dan wacana politik yang sering kali mengaitkan Islam dengan isu identitas, keamanan, dan integrasi sosial.

Perbandingan kedua negara memperlihatkan dua model ekstrem dalam hubungan antara agama dan negara. Indonesia menampilkan model integratif, di mana pendidikan Islam dan lembaga-lembaganya diakui sebagai bagian dari pembangunan nasional. Sebaliknya, Prancis menampilkan model sekuler ketat yang menjauhkan agama dari ranah publik. Model inilah yang membuat perkembangan pendidikan Islam di Prancis terfragmentasi, cenderung informal, dan lebih bergantung pada kapasitas komunitas lokal. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kebijakan negara memainkan peran sentral dalam menentukan bagaimana pendidikan Islam berkembang, baik dari sisi legitimasi, akses, maupun kualitas.

Selain itu, penelitian ini juga mengungkap bahwa perbedaan kebijakan tersebut berdampak langsung pada pembentukan identitas keagamaan generasi Muslim. Di Indonesia, identitas keagamaan dapat berkembang selaras dengan identitas kebangsaan karena pendidikan agama terintegrasi ke dalam kurikulum sekolah. Sebaliknya di Prancis, identitas keagamaan berkembang di luar ruang formal karena tidak adanya ruang di sekolah negeri untuk pembelajaran agama, sehingga identitas Islam lebih banyak terbentuk di komunitas dan keluarga, bukan melalui sistem pendidikan publik.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pendidikan Islam merupakan fenomena sosial-politik yang tidak bisa dipisahkan dari konteks negara. Indonesia menunjukkan bagaimana dukungan penuh negara dapat memperkuat lembaga pendidikan Islam dan menempatkannya dalam posisi strategis. Sementara itu, Prancis menunjukkan bagaimana pembatasan negara terhadap agama berdampak pada perkembangan pendidikan Islam yang minim, tidak merata, dan sarat tantangan.

Oleh karena itu, studi ini memberikan pemahaman bahwa pengembangan pendidikan Islam di berbagai negara harus mempertimbangkan konteks sosial dan politik masing-masing. Di negara dengan mayoritas Muslim seperti Indonesia, tantangan utama terletak pada peningkatan kualitas, inovasi kurikulum, dan relevansi pendidikan Islam terhadap kebutuhan global. Di negara sekuler seperti Prancis, tantangannya lebih pada upaya mendapatkan legitimasi, memperbaiki persepsi publik, serta memperkuat kapasitas komunitas agar pendidikan Islam dapat berfungsi optimal meskipun dalam ruang yang terbatas.

Dengan demikian, perbandingan ini tidak hanya memberikan gambaran tentang perbedaan sistem, tetapi juga menunjukkan bagaimana pendidikan Islam tetap menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat Muslim di mana pun mereka berada. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan bagi kajian komparatif pendidikan Islam dan dapat menjadi dasar bagi peneliti,

praktisi pendidikan, dan pembuat kebijakan untuk mengembangkan pendekatan pendidikan yang inklusif, adaptif, dan responsif terhadap dinamika masyarakat yang semakin plural dan multikultural

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Syukur Al-Azizi. (2025). *Khazanah Peradaban Islam Di Timur dan Barat* (Rusdianto (ed.)). Diva Press.

Agung sasongko. (2007). Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam di Prancis. *Khazanah Republika*.

Ahmad,A &Nini. 2024.Perbandingan Pendiddikan 3 Negara Maju Bekembang dan Islam. depok

Alatas, S. F., & Arifin, M. 2022. "Comparative Analysis of Islamic Education Policies in Indonesia and France". *Journal of Comparative Education*, 52(3),

Akhyar, M., & Zukdi, I. (2025). Ahmad Dahlan's Thoughts on Education as a Means of Empowering the People. *World Journal of Islamic Learning and Teaching*, *2*(1), 1–12.

Akhyar, M., Zukdi, I., & Deliani, N. (2024). Value-Based Leadership of Islamic Education Teachers and Its Role in Disciplinary Religious Practice Formation: A Qualitative Case Study in an Indonesian Public School. *Jurnal Pendidikan Islam*, *13*(2), 97–105.

Akhyar, M., Zukdi, I., Deliani, N., & Khadijah, K. (2025). Implementation of the Values of the Qur'an and Hadith in Managing Education Oriented towards the Formation of Islamic Morality. *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, *10*(1), 44–55.

Akyuni, Q. (2021). Perkembangan Pendidikan Islam di Negara Eropa: Pendidikan Islam di Inggris. *Serambi Tarbawi*, *9*(2), 177–188. https://doi.org/10.32672/tarbawi.v9i2.5061

Febriani, S., Iswantir, M., & Akhyar, M. (n.d.). Pengembangan dan Inovasi Kurikulum Pendidikan Islam dalam Menghadapi Era Digital 4.0. *Instructional Development Journal*, *7*(1).

Fuad, R., Iswantir, M., Akhyar, M., & Gusli, R. A. (2023). Strategi manajemen madrasah efektif dalam peningkatan kualitas belajar mengajar. *Idarah Tarbawiyah: Journal of Management in Islamic Education*, *4*(2), 207–218.

Gusli, R. A., Iswantir, M., & Akhyar, M. (2023). KONSEP MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN LEMBAGA ISLAM DI MTs S SUNGAI RAMBAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN. *Jurnal Bilqolam Pendidikan Islam*, *4*(2), 61–78.

Karimullah, & Susanto, E. (2015). Kebijakan Pendidikan Nasional Bidang Agama Islam di Indonesia. TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam, 10(1), 104-107.

Kemenag RI. Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia

Lestari, K. M., M, I., Gusli, R. A., & Akhyar, M. (2023). *Konsep manajemen keuangan dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMAN 3 Bukittinggi*. *4*(3), 262–271. https://doi.org/10.32832/idarah.v4i3.15590

Mustakim, M. (2021). Rekognisi Kebijakan Pemerintah Terhadap Pesantren sebagai Lembaga Pendidikan di Indonesia. Transformasi: Jurnal Kepemimpinan & Pendidikan Islam, 3(2), 28-41.

Nurhidaya, M. (2025). Kurikulum Pendidikan Islam di Indonesia: Transformasi dan Tantangan. *MICJO: Jurnal Pendidikan Islam*.

Rozak, A., & Az-Ziyadah, A. I. (2021). Kebijakan pendidikan di Indonesia. Alim| Journal of Islamic Education, 3 (2).

Syakhrani, A. W. (2022). Sistem Pendidikan di Negara Perancis. *ADIBA: Jurnal Studi Pendidikan*.

Syakhrani , M., Azhari, S. R., Fitriani, N. 2022). Sistem pendidikan di negara Prancis. ADIBA Journal of Education, 2(3)

Suryadarma, Daniel.2022.Islam dan Pendidikan di Eropa: Studi Kebijakan Pendidikan Islam di Prancis dan Inggris. *Jurnal Studi Islam* 3(2).

Yudikati, T. (2022). Analisis Kebijakan Pendidikan Islam di Eropa. *Jurnal Tadribuna*, 3 (1).